

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk melindungi kesehatan perempuan, di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, serta program Antenatal Care (ANC) Terintegrasi. Kebijakan ini selaras dengan target global *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Upaya ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang menekankan pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.

Secara global berdasarkan KEMENKES RI, (2024) WHO (2024) melaporkan bahwa pada tahun 2020 terdapat sekitar 287.000 kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, dengan penyebab utama perdarahan, hipertensi, dan infeksi. Di Indonesia, data *Survei Status Gizi Indonesia* (SSGI) 2023 menunjukkan AKI sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun ada penurunan dibandingkan periode sebelumnya, angka ini masih jauh dari target SDGs dan menunjukkan kesenjangan antarwilayah, khususnya antara perkotaan dan pedesaan.

Di Provinsi Jawa Barat, Profil Kesehatan 2023 mencatat 792 kematian ibu (96,89 per 100.000 kelahiran hidup), meningkat dari 678 kasus pada tahun 2022. Di Kabupaten Purwakarta, persentase persalinan yang ditangani tenaga kesehatan menurun dari 98,8% pada tahun 2021 menjadi 96,3% pada tahun 2022. Berdasarkan data cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta, Puskesmas X secara konsisten menunjukkan capaian yang berada di bawah target 85% dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Maniis hanya mencapai 60%, menurun dibandingkan tahun 2021 dan 2020 yang sama-sama sebesar 72,7%. Sebelumnya, pada tahun 2018 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah ini tercatat sebesar 69,24% dan pada tahun 2017 sebesar 71,14%. Penurunan capaian juga terlihat pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 66,61%, yang merupakan salah satu capaian terendah di kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015–2022, Puskesmas X tidak pernah mencapai target cakupan minimal 85% dan bahkan mengalami tren penurunan pada beberapa tahun tertentu (Dinkes Purwakarta, 2022).

Tren ini mengkhawatirkan karena persalinan oleh paraji tanpa dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan meningkatkan risiko komplikasi serius seperti pendarahan, infeksi, atau hipertensi. Risiko semakin besar jika bantuan medis terlambat atau standar pelayanan tidak terpenuhi, padahal setiap ibu berhak mendapatkan perawatan yang cepat, aman, dan bermartabat demi keselamatan dirinya dan bayinya Wulandari et al., (2023). Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah dan Puskesmas X melakukan berbagai langkah strategis, seperti

edukasi dan sosialisasi mengenai risiko persalinan dengan paraji, serta menjalin kemitraan dengan mereka. Paraji diimbau untuk tidak menangani persalinan secara mandiri tanpa tenaga medis, namun tetap dilibatkan dalam program kesehatan ibu dan bayi. Meski demikian, sebagian paraji masih enggan berkontribusi karena menganggap bidan sebagai pesaing.

Proses melahirkan kerap kali dianggap sebagai momen yang menentukan bagi seorang calon ibu, karena risiko yang muncul bisa tidak terduga, sehingga elemen keamanan serta kehandalan pendukung persalinan sangat vital untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan tenaga kesehatan, khususnya bidan, di daerah pedesaan. Penempatan tenaga kesehatan merupakan salah satu strategi utama dalam mengatasi masalah kesehatan bagi ibu dan anak. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, yang menekankan bahwa proses persalinan harus berlangsung di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kehadiran tenaga medis yang berkompeten. Regulasi ini menjelaskan bahwa setiap proses melahirkan minimal harus ada satu tenaga medis dan dua tenaga kesehatan berwenang, seperti dokter, bidan, atau perawat. Namun, dalam kondisi tertentu di mana akses ke fasilitas kesehatan terbatas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh minimal dua tenaga kesehatan yang kompeten. Aturan ini dibuat untuk memastikan setiap ibu mendapatkan pertolongan persalinan yang aman dan sesuai standar medis.

Khoeroh & Hafsah, (2023) menyatakan untuk menjamin persalinan yang aman, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, termasuk program Antenatal

Care (ANC) terintegrasi yang bertujuan memberikan pemeriksaan kehamilan menyeluruh, edukasi kesehatan, dan deteksi dini risiko kehamilan. Namun, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan akses di daerah terpencil, kekurangan tenaga kesehatan, serta kuatnya kepercayaan pada persalinan tradisional, sehingga sebagian ibu hamil enggan rutin memeriksakan kehamilan ke puskesmas.

Penelitian Wulandari et al., (2023) menyatakan persalinan di rumah dengan paraji lebih diminati wanita dan keluarganya karena dianggap sebagai proses alamiah, sedangkan fasilitas kesehatan baru dipilih jika terjadi kesulitan persalinan. Faktor lain yang memengaruhi pilihan ini meliputi aspek sosial-budaya, keterbatasan ekonomi, mutu layanan kesehatan, kebiasaan melahirkan di rumah, rendahnya pemenuhan syarat minimal ANC, keterbatasan transportasi, jarak dan biaya, kemiskinan, rendahnya pendidikan formal, serta kurangnya persetujuan dari keluarga.

Secara umum, masyarakat menghargai layanan yang diberikan oleh bidan, terutama saat tersedia program bantuan gratis. Namun, faktor ekonomi sering kali menjadi kendala bagi sebagian orang untuk rutin memeriksakan kehamilan mereka ke tenaga kesehatan. Di samping itu, terdapat beberapa keluhan terkait pelayanan bidan, seperti lambatnya respons ketika diminta bantuan terutama pada malam hari, kurangnya inisiatif, serta sikap yang dinilai kurang sabar dalam mendampingi proses persalinan. Dalam kondisi seperti ini, dukun bayi atau paraji kerap menjadi alternatif, karena dinilai lebih sabar, telaten, dan setia mendampingi hingga persalinan selesai.

Kehadiran bidan yang umumnya berasal dari luar daerah juga turut memengaruhi kedekatan sosial mereka dengan masyarakat setempat. Perbedaan latar belakang, terutama jika bidan bukan berasal dari etnis lokal, kadang menjadi penghambat dalam komunikasi dan interaksi sosial. Selain itu, biaya layanan yang dianggap cukup tinggi dibandingkan jasa dukun bayi atau paraji menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan tempat bersalin. Meskipun regulasi telah menetapkan bahwa persalinan seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, praktik persalinan tradisional yang ditangani oleh dukun bayi atau paraji masih banyak ditemukan di berbagai daerah. Hal ini mencerminkan kuatnya posisi persalinan di tangani non-nakes dalam budaya lokal, karena mereka dianggap lebih mudah diakses, memiliki ikatan emosional dengan keluarga, serta dipercaya mampu memberikan dukungan yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga spiritual dan sosial (Fitriah & Saputera, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kesehatan telah ditetapkan, masih ada tantangan dalam implementasinya. Edukasi kepada masyarakat, peningkatan akses layanan kesehatan, serta pendekatan yang lebih inklusif terhadap tenaga tradisional perlu terus dilakukan agar setiap persalinan berlangsung dengan aman, sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan (Fitriah & Saputera, 2023).

Beberapa studi sebelumnya telah menekankan aspek-aspek yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi untuk bersalin. Selina et al., (2023) menyatakan bahwa pengetahuan ibu serta dukungan dari keluarga adalah faktor utama yang mempengaruhi pilihan tempat bersalin. Namun, sampai saat ini,

belum ada penelitian yang secara khusus meneliti fenomena ini di wilayah kerja Puskesmas X Purwakarta. Seperti yang disampaikan oleh Lilis et al.,(2022) semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu, semakin besar kemampuannya untuk memahami pentingnya persalinan yang aman dan memilih layanan kesehatan yang layak. Setiap ibu seharusnya didukung untuk membuat keputusan yang bijak demi keselamatan dirinya dan bayinya. Sari et al., (2020) menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga dan pendapatan memiliki dampak yang signifikan dalam keputusan seorang ibu saat memilih lokasi bersalin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan tempat bersalin yang tidak berbasis pada tenaga kesehatan di area tersebut.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemilihan tempat persalinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dukungan keluarga, serta motivasi ibu. Dukungan keluarga yang baik membuat ibu merasa lebih aman dan tenang secara emosional dalam mengambil keputusan. Selain itu, ibu yang memiliki motivasi kuat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan cenderung dapat mengurangi risiko komplikasi. Sebaliknya, persalinan yang ditolong oleh tenaga nonmedis sering kali masih dilakukan dengan cara-cara yang tidak steril, seperti penggunaan alat yang kurang higienis dan praktik tradisional, sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan ibu dan bayi (Sari et al., 2020; Pratiwi et al., 2023; Monita et al., 2022).

Faktor sosial budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan tempat persalinan. Menurut Muzakkir, (2018) Di masyarakat pedesaan,

keputusan tentang proses persalinan sering kali berada di tangan orang tua, mertua, atau kerabat yang lebih tua. Dalam situasi seperti ini, peran pendidikan menjadi sangat penting.. Selain itu, Monita et al., (2022) menyoroti bahwa pendapatan keluarga menjadi faktor utama dalam akses terhadap layanan kesehatan. Kondisi ekonomi yang terbatas sering kali membuat ibu memilih tenaga nonmedis karena biayanya yang lebih murah, meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi (Pratiwi et al., 2023).

Selain faktor ekonomi dan sosial, nilai budaya juga menjadi dasar dalam membentuk perilaku masyarakat terkait persalinan. Monita et al. (2022) menyatakan bahwa di masyarakat pedesaan, kepercayaan terhadap dukun bayi masih lebih kuat dibandingkan tenaga kesehatan. Perilaku ini terbentuk melalui proses belajar dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun (Muzakkir, 2018). Kepercayaan ini menyebabkan masyarakat lebih memilih persalinan tradisional meskipun berisiko tinggi.

Pemilihan tempat persalinan paraji dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu, keterbatasan biaya, dukungan suami dan keluarga, jarak ke fasilitas kesehatan, serta pengaruh budaya setempat. Rendahnya pemahaman akan risiko, ditambah keterbatasan akses dan biaya persalinan, membuat sebagian ibu memilih melahirkan secara tradisional. Dukungan keluarga, khususnya suami, turut memengaruhi keputusan ini, sementara nilai budaya yang mengakar memperkuat kepercayaan persalinan di bantu oleh paraji. Karena itu, sangatlah penting untuk menggali secara lebih mendalam agar dapat memahami dengan empati dan kepedulian bagaimana

faktor-faktor ini berinteraksi dan memengaruhi keputusan ibu, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan keselamatan persalinan (Mutmainnah et al., 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan menggunakan data sekunder dari Puskesmas X tahun 2024, tercatat 141 ibu melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan dan 50 ibu melahirkan ditolong oleh paraji. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kebijakan nasional yang menegaskan persalinan sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, peran paraji masih kuat di masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian serius karena paraji tidak memiliki kompetensi medis yang memadai, sehingga meningkatkan risiko komplikasi, keterlambatan penanganan, bahkan kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pemilihan tempat persalinan paraji dengan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Penolong Persalinan Paraji di Wilayah Kerja Puskesmas X, Kabupaten Purwakarta”

## **B. Rumusan Masalah**

rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa hubungan pengetahuan dengan pemilihan penolong persalinan?
2. Apa hubungan pendidikan dengan pemilihan penolong persalinan?
3. Apa hubungan pendapatan keluarga dengan pemilihan penolong persalinan?
4. Apa hubungan dukungan suami/keluarga dengan pemilihan penolong persalinan?
5. Apa hubungan jarak ke fasilitas kesehatan dengan pemilihan penolong persalinan?
6. Apa hubungan sosial budaya dengan pemilihan penolong persalinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan di wilayah kerja puskesmas X, Kabupaten Purwakarta.

#### 2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan, pendidikan, pendapatan keluarga, dukungan suami dan keluarga, jarak, sosial budaya, dan pemilihan penolong persalinan
- b. Menganalisis hubungan pengetahuan ibu dengan pemilihan penolong persalinan
- c. Menganalisis hubungan pendidikan ibu dengan pemilihan penolong persalinan
- d. Menganalisis hubungan pendapatan keluarga dengan pemilihan penolong persalinan
- e. Menganalisis hubungan dukungan suami/keluarga dengan pemilihan penolong persalinan
- f. Menganalisis jarak tempuh menuju fasilitas kesehatan dengan pemilihan penolong persalinan
- g. Menganalisis hubungan sosial budaya dengan pemilihan penolong persalinan

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan menjadi data dasar untuk melakukan upaya meningkatkan persalinan aman dan sesuai standar. Dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan promosi kesehatan dalam meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan.

c. Bagi pihak institusi pendidikan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk mendorong pengembangan kebijakan dan program pendidikan yang lebih baik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Penolong Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas X, Kabupaten Purwakarta” yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang dari masalah yang diangkat, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teoritis, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencantumkan analisis dan hasil pengolahan data, serta pembahasan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan persalinan di wilayah kerja Puskesmas X Kabupaten Purwakarta.

#### BAB V KESIMPULAN

Menguraikan kesimpulan berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.